

Andalas Journal of International Studies



Wishnu Mahendra Wiswayana

Dinamika Permasalahan Laut Tiongkok Selatan & Tantangan Serius terhadap Ide Poros Maritim Dunia

Anita Afriani Sinulingga

Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani

Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional

Gema Ramadhan Bastari

Regionalisme Isu Lingkungan Asia Tenggara (1997-2000)

Noraini bt Zulkifli & Vivian Louise Forbes

Japan and The South China Sea

Loade Muhamad Fathun

Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional

Andalas Journal of International Studies	Volume 5	No 1	Halaman 1-107	Padang Mei 2016	ISSN 2301-8208
--	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Strategic Studies
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Andalas Journal of International Studies

ISSN : 2301 - 8208

Published by

Andalas Institute of International Studies – ASSIST

International Relations Department

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Andalas

Padang

Editor in Chief : Sofia Trisni, Winda Ariany
Editorial Board : Apriwan, Anita Afriani Sinulingga, Poppy Irawan
Associate Editors : VirtuousSetyaka, HaiyyuDarmanMoenir, Rika Isnarti,
Putiviola Elian Nasir, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, Silsila Asri
Design/ lay out : Agung Imam Zulhatta, Annisa Fitri, Dewi Putri Cornelis
Editorial Advisory Board : Kim So-il (Busan University of Foreign Studies)
Abu Bakar Eby Hara (University Utara Malaysia, Universitas
Jember)
Philips Vermonte (CSIS Jakarta)
Arry Bainus (Universitas Padjadjaran)
Muhammad Yunus (Universitas Airlangga)
Editorial Office : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266
Homepage : <http://hi.fisip.unand.ac.id/assist/publication/ajis/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Summit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional

Anita Afriani Sinulingga*
nanisinulingga@gmail.com

Abstract

This article seeks to explore how the issue of disaster and humanitarian principles applied in International Relations' studies. This article will be shaped into two parts. The first section will describe the disaster issues in International Relations' studies. This section will explain how to link disaster issues in international relations and the application of disaster issues that may be developed in International Relations' studies. The second part will describe the development of Humanitarian principles derived from the Geneva Convention. In the convention, there are four humanitarian principles as the basis of any humanitarian action, but these principles need to be so that it can operationalize in International Relations' studies.

Keywords: disaster, humanitarian, International Relations' studies

* Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan ilmu HI, isu bencana menjadi salah satu isu yang relevan sebagai sebuah kajian. Isu bencana dapat dilihat sebagai isu keamanan non-tradisional dalam Ilmu HI. Jika sebelumnya bencana dipandang hanya sebagai “cobaan Tuhan” sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, saat ini lebih dipandang sebagai sebuah ancaman, resiko, kerentanan serta dapat dikontrol dan dimitigasikan²². Lebih jauh bencana merupakan isu sosial yang berkaitan dengan resiko yang dihadapi masyarakat. Resiko (*risk*) suatu masyarakat terhadap bencana merupakan kombinasi antara bahaya (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap kemampuan (*capacities*) masyarakat yang terkena dampak bencana.

Isu bencana dewasa ini telah melibatkan banyak aktor, tidak hanya peran negara yang menjadi sorotan disana, namun aktor non-negara seperti organisasi internasional, kelompok masyarakat, MNC/ TNC, media massa juga memiliki ruang tersendiri. Relasi antara aktor tersebut dalam isu bencana dapat dijelaskan sebagai hubungan antara negara penerima donor dan lembaga pendonor.

²²Nathan F, *Disaster and Human Security*, Paper for the Montreal ISA Conference, 18 Maret 2004, ed. June Cahyaningtyas dan Ludiro Madu, Isu Bencana dalam Hubungan Internasional, (Bandung: Graha Ilmu, 2013)

Fenomena ini memperlihatkan menguatnya solidaritas transnasional dalam merespon terjadinya bencana

Selanjutnya, globalisasi telah menyebabkan bencana, tidak lagi menjadi persoalan lokal semata, namun telah menjadi masalah global. Isu bencana dewasa ini telah menjadi isu yang melewati lintas batas negara. Misalnya, bencana kabut asap di sebuah negara akan mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara lain, khususnya negara tetangga. Bencana yang terjadi di negara tertentu saat ini telah menjadi perhatian masyarakat dunia sehingga pada setiap terjadinya bencana, bantuan kemanusiaan dari lembaga-lembaga internasional, baik yang berasal dari negara, perusahaan transnasional atau organisasi internasional, selalu hadir di wilayah bencana. Lebih mendalam, kaitan antara isu bencana dan ilmu HI akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya.

II. Isu Bencana dalam Ilmu Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah sebuah istilah yang secara umum terkait dengan relasi–relasi antar negara. Namun istilah ini dianggap terlalu sempit sehingga kemudian muncul istilah Politik Dunia. Politik Dunia tidak hanya menggambarkan relasi negara namun yang juga meliputi aktor-aktor non-negara. Keamanan,

ekonomi (kesejahteraan), dan identitas dapat dilihat sebagai tiga tujuan atau fokus utama yang dikejar oleh organisasi-organisasi dan individu. Perjuangan terhadap tiga tujuan ini membantu menjelaskan bukti-bukti konflik dan kerjasama dewasa ini dalam hubungan internasional maupun politik dunia²³. Di sisi lain, ilmu HI dijelaskan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan-hubungan politik negara-negara dan berbagai interaksi antara institusi multilateral pada level global. Konflik antar negara merupakan isu utama yang dikaji oleh para pakar sehingga perang dan damai adalah masalah utama dalam kajian ini. Tujuannya adalah untuk mencari pemahaman tentang buruknya sebuah peperangan, dalam usaha untuk menemukan upaya untuk mencegah terjadinya perang²⁴. Lebih jauh, relasi antara isu bencana dalam ilmu HI akan dijelaskan sebagai berikut²⁵.

Pertama, kajian bencana dan manajemen emergensi mengarah pada perkembangan relasi-relasi global. Seiring lahirnya Ilmu HI pada awal Perang Dunia II hingga medio abad 20, bencana juga

menjadi isu penting bagi praktisi maupun ilmuwan di era Perang Dingin. Terjadinya krisis misil Kuba 1962 merupakan awal lahirnya manajemen emergensi yang ditandai dengan berkembangnya pertahanan sipil. Tujuan pertahanan sipil adalah melindungi pemerintah dan masyarakat dari dampak perang nuklir. Para pembuat kebijakan pertahanan mengidentifikasi upaya-upaya untuk mengevakuasi pejabat publik dan masyarakat Amerika ketika misil-misil Uni Soviet diluncurkan. Di sisi yang lain, negara-negara lain termasuk Rusia juga melakukan upaya-upaya emergensi selama masa Perang Dingin. Selain proses instutionalisasi manajemen bencana, Amerika Serikat juga mendanai kajian-kajian bencana untuk mengetahui perilaku manusia terhadap bencana. Para ilmuwan menemukan bahwa, manusia cenderung bersikap rasional ketika terjadi bencana.

Kedua, Studi HI dan bencana berada dalam cakupan organisasi internasional. Ilmuwan dalam disiplin ilmu HI berusaha memahami aktivitas institusi-institusi global (seperti LBB dan PBB) serta organisasi non pemerintah (NGO) di level global. Terdapat berbagai bentuk operasi bersama di wilayah bencana antara organisasi pemerintah dan non pemerintah. Misalnya the International Relief Union, NGO yang berdiri pada tahun 1921 di Italia, dan the United Nations Disaster

²³Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations & World Politics* (5th ed), (USA: Pearson, 2013), hal 15-18

²⁴ David A. McEntire, *International Relations and Disasters: Illustrating the Relevance of the Discipline to the Study and Profession of Emergency Management*, (Federal Emergency Management Agency: 2004), hal 1-2

²⁵Ibid . hal 3-8

Relief Organization, agensi PBB yang didirikan pada tahun 1971, kedua lembaga tersebut mengkoordinasikan bantuan internasional kepada negara-negara yang mengalami bencana. Organisasi Palang Merah Dunia yang pada awalnya dibentuk untuk membantu para tentara yang terluka di medan perang, namun ruang lingkup operasinya berkembang ke bantuan bencana. Selain IGO dan NGO, terdapat ribuan lembaga-lembaga sukarelawan berupaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah bencana.

Pakar dalam ilmu HI berupaya menganalisis kinerja organisasi tersebut dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kemampuan operasinya. Saat ini, terdapat sejumlah pemikiran yang dihasilkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan koordinasi dalam *complex emergencies*. Studi Ilmu HI selanjutnya berkontribusi gambaran umum mengenai organisasi internasional serta bagaimana organisasi tersebut dapat mengatasi berbagai kesulitan ketika menghadapi bencana di seluruh dunia.

Ketiga, dalam riset tentang keamanan. Jika sebelumnya definisi keamanan sangat terkait dengan pengendalian senjata khususnya senjata nuklir, namun saat ini definisi keamanan meluas. Berbicara tentang isu keamanan harus memperhitungkan isu lain termasuk bencana alam atau bencana lainnya. Saat

ini, fokus pemerintah negara-negara sangat besar terhadap terorisme sebagai isu penting di luar isu keamanan. Dalam isu terorisme, negara-negara bekerjasama dengan satuan intelijen, melakukan kampanye anti proliferasi, kontrol perbatasan, perlindungan infrastruktur, manajemen emergensi dan isu lainnya.

Keempat, peristiwa bencana besar mempengaruhi semua kawasan di seluruh dunia. Bencana besar yang terjadi pada sebuah negara memberikan dampak yang buruk bagi negara lainnya. Bencana memberikan konsekuensi terhadap permasalahan internasional seperti pada kasus kecelakaan nuklir Chernobyl menyebabkan radiasi di seluruh dunia, gempa bumi Kobe mempengaruhi pasar komputer di Amerika Serikat dan negara lainnya, konflik Rwanda menyebabkan berbagai masalah pengungsi di berbagai negara.

Kelima, bencana yang membawa dampak yang destruktif membutuhkan pendekatan global. Para pakar telah mengilustrasikan bahwa aktivitas di sebuah negara dan berasal dari sistem ekonomi global memberikan pengaruh besar kepada negara lain. Misalnya pada kasus, Union Carbide, sebuah perusahaan milik Amerika Serikat, menyebabkan korban meninggal sebanyak 5000 orang di India akibat pencemaran bahan kimia. Bencana yang terjadi sebagian besar di

negara-negara berkembang, dengan kapasitas yang tidak memadai untuk menanggulangi dampak bencana, maka upaya-upaya kolaborasi dibutuhkan dalam pengurangan resiko bencana.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dirangkum bahwa isu bencana telah lahir seiring era Perang Dingin, sebelum lahirnya kajian Ilmu HI pasca Perang Dunia II, yang memperlihatkan adanya relasi-relasi global dalam isu bencana. Keterkaitan ilmu HI dan isu bencana juga ditemukan sering dengan perkembangan organisasi internasional dan perluasan keamanan tradisional. Relasi antar negara yang bersifat transnasional juga digambarkan melalui peristiwa bencana besar mempengaruhi semua kawasan di seluruh dunia dimana membutuhkan upaya-upaya kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana. Selanjutnya isu bencana dapat diaplikasikan dalam beberapa kajian dalam ilmu HI sebagai berikut.

Pertama, isu bencana dalam kajian kebijakan luar negeri. Isu penanggulangan bencana merupakan isu strategis yang ingin dicapai dan dikuasai oleh negara, khususnya negara-negara yang rawan bencana. Isu bencana dapat menjadi keuntungan komparatif atau keunggulan kompetitif bagi sebuah negara. Dalam perspektif yang lebih luas, keuntungan dan keunggulan tersebut bukan hanya pada

aspek finansial, namun dimensi-dimensi lain yang tidak dapat dikuantifikasi seperti citra, pengakuan dan sebagainya²⁶. Citra sebuah negara akan meningkat ketika negara tersebut dalam isu bencana tidak hanya sebagai negara penerima bantuan, namun menjadi negara donor. Adanya pengakuan dunia terhadap negara-negara yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penanggulangan bencana akan memperbaiki posisi tawarnya dalam mempengaruhi negara lain. Dalam kondisi ini, isu bencana berpeluang menjadi *nation branding* atau *image building* yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan politik luar negeri dan diplomasi.

Kedua, isu bencana dalam diplomasi. Pasca Perang Dunia II, diplomasi merupakan upaya yang digunakan secara luas oleh negara-negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dewasa ini terdapat berbagai bentuk diplomasi yang berkembang, salah satunya diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan biasanya diterapkan pada saat terjadinya bencana besar, banyak negara menyalurkan bantuan luar negerinya, selain sebagai sebuah panggilan kemanusiaan, juga sebagai instrumen diplomasi negaranya terhadap negara penerima bantuan. Saat terjadi bencana

²⁶Syamsul Maarif, *Penanggulangan Bencana sebagai Diplomasi Soft Power Indonesia* dalam June hal 6

gempa bumi dan tsunami di Jepang pada Maret 2011, hampir 115 negara di dunia yang berkomitmen memberikan bantuannya ke Jepang. Hal yang sama juga terjadi ketika bencana tsunami di Aceh, banjir di Pakistan, gempa di Haiti, dan sebagainya. Interaksi antar aktor-aktor kemanusiaan membentuk sebuah relasi dan tidak jarang mereka akan terlibat dalam sebuah negosiasi dengan berbagai aktor. Diplomasi kemanusiaan dewasa ini lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan individu.

Ketiga, isu bencana dalam kajian rezim internasional. Berkembangnya asumsi bahwa kerjasama internasional dimungkinkan dalam kondisi dunia yang anarki memberikan dampak positif baik kepada organisasi internasional, para ilmuwan dan ahli-ahli kebijakan untuk berkiprah di dalam berbagai area isu seperti keamanan, perdagangan, lingkungan. Pada akhir 1980an, sekelompok ilmuwan dan praktisi berkumpul untuk mendiskusikan tentang peningkatan intensitas dan dampak dari bencana. Hasilnya tahun 1990an ditandai sebagai momentum peringatan *United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction*. Meskipun pada awalnya isu bencana dilihat dengan pendekatan teknokrat, namun dapat dilihat rezim internasional berkembang pada isu-

isu yang lebih luas. Era ini juga memberikan pengaruh terhadap komunitas epistemik dalam isu tata kelola bencana internasional.

Keempat, isu bencana dalam kajian keamanan internasional. Globalisasi telah mengubah politik internasional menjadi *post-international politics* dimana aktor non negara mulai mengemuka sebagai aktor dominan selain aktor negara. Konsekuensinya adalah tatanan interaksi internasional menjadi semakin kompleks dan *multicentric*. Dengan aktivitasnya yang melewati lintas batas negara, aktor non negara tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional berlaku *no fixed traditional boundaries*. Selanjutnya globalisasi telah menyebabkan negara untuk meninjau kembali konsep keamanan²⁷.

Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial²⁸. Menurut pendekatan ini, sektor militer hanyalah satu aspek penting dari konsep keamanan. Perkembangan globalisasi telah menyebabkan perubahan konsep keamanan diantaranya sumber ancaman

²⁷AA Banyu Perwita, *Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo-Realisme dalam HI Kontemporer*, dalam Yulius P.Hermawan (ed), *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2007)

²⁸Barry Buzan, *People, State Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*, (Lynne Rienner Publishers: 1991)

tidak lagi hanya bersifat militer, isu keamanan berkembang menjadi isu-isu yang lebih beragam seperti konflik SARA, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan yang berujung pada terjadinya bencana dan lain-lain. Jika ancaman terhadap keamanan biasanya dianggap bersumber dari luar negara, ancaman juga mungkin berasal dari level domestik negara maupun global. Keamanan saat ini tidak hanya ditujukan bagi kelangsungan negara, namun juga menjadi kebutuhan bagi aktor lainnya, termasuk individu sehingga keamanan sangat dipengaruhi oleh interaksi individu pada level global.

III. Prinsip-Prinsip Humanitarian dalam Ilmu Hubungan Internasional

Humanitarianism dalam *Journal of Humanitarian Assistance* didefinisikan sebagai kerja kemanusiaan yang berlaku lintas batas negara dengan tujuan menolong mereka yang membutuhkan. Melakukan sesuatu bagi korban bencana merupakan sebuah keharusan dan kewajiban moral. Bantuan kemanusiaan sendiri merupakan kegiatan memberikan sesuatu kepada korban bencana. Hak-hak dasar kemanusiaan yang sering kali hilang ketika terjadinya bencana menuntut adanya aksi-aksi kemanusiaan. Konsep *Humanitarianism* dapat dilihat dalam aplikasinya di dua kondisi yakni perang

dan bencana alam²⁹. Meski pasca Perang Dunia II, bencana kemanusiaan akibat konflik semakin menurun, dipihak lain justru bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam semakin meningkat dengan dampak yang luar biasa besar, terutama pasca dekade 1990an. Bencana banjir, badai, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus banyak terjadi dan menelan kerugian cukup besar, baik kerugian jiwa maupun materil³⁰.

Bantuan kemanusiaan dengan konsep humanitarian dalam konvensi Jenewa menekankan pada usaha untuk menghilangkan penderitaan manusia yang terjadi akibat krisis atau bencana. Prinsip tersebut merupakan komitmen paling utama dalam aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam aksi kemanusiaan. Kata “bencana” sendiri merupakan kata kunci bagi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya³¹. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kesiapan berbagai pihak dalam penanggulangan pascabencana. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, pemerintah

²⁹Annisa Gita Srikandi, “Comprehensive Security and Humanitarian Action”, *Multiversa: Journal of International Studies* 2 No. 1, (2010)

³⁰Lebih lanjut lihat *providing humanitarian aid* dalam <http://www.usaid.org>

³¹Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis, diakses dari <http://politik.lipi.go.id/in/kegiatan/tahun-2010/342-focus-group-discussion-bencana-ditinjau-dari-aspek-pengetahuan-dan-praktis.html> pada 12 September 2013

nasional mempunyai tanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana alam³². Namun selain negara, di tataran global, masalah aksi kemanusiaan diwarnai dengan kemunculan para aktor yang terdiri atas institusi negara, militer, keamanan, Non Government Organization (NGO) baik di tingkat lokal maupun yang mengusung agama tertentu, hingga organisasi profesi (dokter) yang menjalankan misi kemanusiaan ke seluruh dunia.

Aksi Kemanusiaan mempunyai dua dimensi yang melekat satu sama lain yaitu perlindungan terhadap manusia dan pemberian bantuan³³. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ UNOCHA*), lebih lanjut menjelaskan prinsip-prinsip Humanitarian sebagai basis dari setiap international humanitarian action. Prinsip-prinsip tersebut antara lain *Humanity*, *Neutrality*, *Impartiality* dan *Independence*³⁴ yang merupakan gambaran dari Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip dalam kerangka kerja yang

dibangun oleh Komite Internasional untuk Palang Merah Dunia (*the International Committee of the Red Cross/ ICRC*). Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dari kerja kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan. Pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dari respon kemanusiaan dalam penanggulangan bencana haruslah didasari oleh prinsip kemanusiaan tersebut. Untuk dapat melihat sejauh mana pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam aksi-aksi kemanusiaan, berikut ini bentuk eksplorasi prinsip-prinsip Humanitarian tersebut.

Humanity, berarti aksi kemanusiaan mengutamakan penyelamatan kehidupan manusia dan menghilangkan penderitaan dimanapun bencana mungkin terjadi. Penderitaan yang dialami oleh korban harus diatasi ketika ditemukan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi dan orang tua. Oleh karena itu, pada setiap aksi-aksi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk, khususnya bagi kelompok rentan. Prinsip ini merupakan komitmen paling mendasar dari para agensi kemanusiaan dalam aksi kemanusiaannya. Operasionalisasi prinsip

³²Crisis Management on National and International Disaster Response diakses dari <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/aksi-kemanusiaan/52-crisis-management-on-national-and-international-disaster-response-.html> pada tanggal 12 September 2012

³³Lebih lanjut lihat www.goodhumanitariandonorship.org

³⁴Lebih jauh lihat OCHA on Messages: Humanitarian Principles dalam <https://docs.unocha.org>

tersebut dapat dilihat pada pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, antara lain:

1. Apakah organisasi memiliki kebijakan dan program yang berorientasi kepada kelompok rentan?
2. Bagaimana meyakinkan bahwa penerima manfaat langsung dari program dan organisasi adalah sebagian besar merupakan kelompok rentan?
3. Apakah organisasi memiliki kebijakan tentang perlindungan terhadap penerima manfaat, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan?

Selanjutnya *Impartiality* berarti implementasi dari aksi kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi, dengan tidak mempertimbangkan kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, maupun ras, saat menolong mereka yang membutuhkan. Aksi kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kemandirian, sertamemberikan prioritas kepada korban-korban dengan kondisi *critical*. Bantuan kemanusiaan diharapkan dapat disuplai kepada mereka-mereka yang mendapatkan penderitaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Prinsip proporsionalitas dan prinsip non-diskriminasif diturunkan dari konsepsi HAM, sebagai dasar dan kerangka kerja

untuk penilaian kebutuhan. Lebih jelasnya, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apakah organisasi memiliki informasi yang jelas tentang prosedur pemilihan target penerima manfaat?
2. Apakah organisasi memiliki informasi yang jelas tentang prosedur rekrutmen staf dan relawan?

Berikutnya *Neutrality*, berarti aksi kemanusiaan harus tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam sebuah konflik bersenjata atau sengketa lainnya dimana aksi tersebut dilaksanakan. Agensi kemanusiaan tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama atau ideologi. Prinsip tersebut mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Adanya transparansi dan keterbukaan menjadi prasyarat bagi netralitas aktor kemanusiaan. Prinsip netralitas dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM. Bentuk aplikasi prinsip tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apakah organisasi memiliki kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara organisasi pengelola bantuan kemanusiaan dengan jajaran

pemerintahan, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan kepentingan politik praktis?

2. Adakah bentuk program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas?

Terakhir *Independence*, berarti aksi kemanusiaan memiliki otonomi untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan terbebas dari tujuan politik, ekonomi, militer dan tujuan-tujuan lainnya. Pada umumnya pelaksanaan aksi kemanusiaan pasti melibatkan stakeholder yaitu penerima manfaat, otoritas nasional atau lokal, donor dan lembaga bantuan. Dalam aksi kemanusiaannya, NGO bertindak secara otonom dan bertanggung jawab kepada penerima bantuan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bersifat politis dari pendonor maupun otoritas yang ada. Operasionalisasi prinsip tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Apakah organisasi memiliki sumber daya (materi dan non-materi) yang jelas dan berkelanjutan?
2. Diantara banyaknya pemangku kepentingan, siapa saja yang terlibat dalam dalam penentuan program?

3. Dalam pengambilan keputusan, adakah pelibatan aktif semua pihak?

Prinsip-prinsip humanitarian yang ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga kemanusiaan umumnya dijelaskan dengan definisi yang sangat umum. Bentuk operasionalisasi dari prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan agar dapat diaplikasikan dalam kajian-kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam isu tata kelola bencana. Tata kelola bencana yang diterapkan oleh aktor-aktor kemanusiaan haruslah berlandas pada keempat prinsip-prinsip Humanitarian.

IV. KESIMPULAN

Hubungan internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan relasi aktor-aktor internasional yang melintasi batas negara dalam berbagai isu. Dalam ilmu HI, isu bencana dapat dilihat sebagai sebuah isu keamanan internasional, dalam bentuk relasi lokal-global, antara aktor-aktor negara dan non-negara. Isu bencana selanjutnya dapat dikaji dalam beberapa kajian dalam ilmu hubungan Internasional antara lain dalam kajian Kebijakan Luar Negeri, kajian Diplomasi, kajian Keamanan Internasional, dan Rezim Internasional.

Kata bencana sendiri sesungguhnya telah menggambarkan keterlibatan banyak pihak dalam penanganannya. Aksi-aksi

kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Humanitarian merupakan dasar bagi pengelolaan bantuan kemanusiaan. Prinsip-prinsip Humanitarian yang bersumber dari Konvensi Jenewa selanjutnya juga dapat diaplikasikan dalam kajian-kajian ilmu HI untuk menilai sejauh mana pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam aksi-aksi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry. *People, state, fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*. Lynne Rienner Publishers, 1991
- Cahyaningtyas, June dan Ludiro Madu (ed), *Isu Bencana dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu, 2013
- Hermawan, Yulius P. (ed), *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Bandung: Graha Ilmu, 2007
- McEntire, David A. *International Relations and Disasters: Illustrating the Relevance of the Discipline to the Study and Profession of Emergency Management*, Federal Emergency Management Agency, 2004
- Srikandi, Annisa Gita, "Comprehensive Security and Humanitarian Action.", *Multiversa: Journal of International Studies* 2 No. 1 (2010)
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, *International Relations & World Politics* (5th ed). USA: Pearson, 2013
- Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis, diakses dari <http://politik.lipi.go.id/in/kegiatan/tahun-2010/342-focus-group-discussion-bencana-ditinjau-dari-aspek-pengetahuan-dan-praktis.html>
- Crisis Management on National and International Disaster Response diakses dari <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/aksi-kemanusiaan/52-crisis-management-on-national-and-international-disaster-response.html>
- www.unocha.org
- www.goodhumanitariandonorship.org